THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

TANTANGAN DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI PBM 2006 TERKAIT ATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DALAM ASPEK KONTEN DAN KONTEKS KEBIJAKAN



ASPEK KONTEN

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

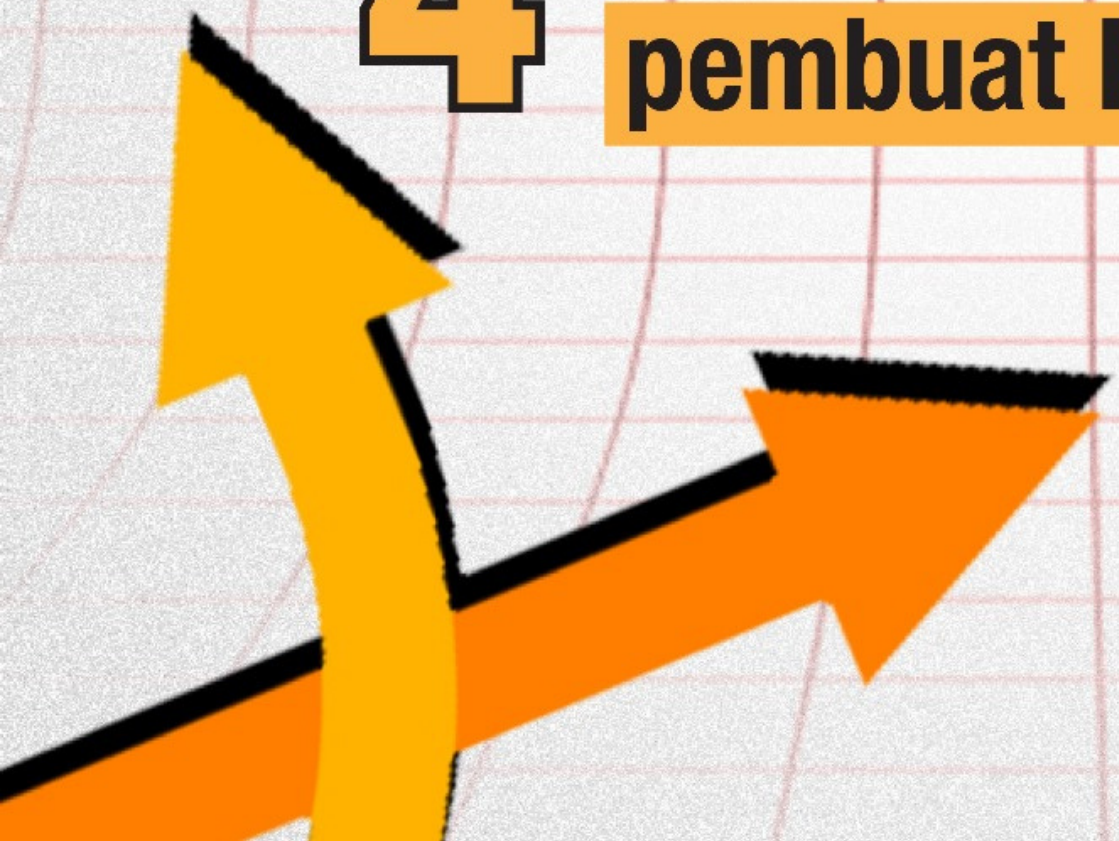
1 **Perizinan pendirian rumah ibadat tidak lepas dari konflik kepentingan yang beragam.**

2 **Aturan pendirian rumah ibadat hanya bersifat formal, yaitu lebih memenuhi syarat administratif pendirian saja.**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

3 **Tidak signifikannya derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan PBM 2006.**

4 **Belum sinerginya kedudukan pembuat kebijakan.**



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

5 Masih belum optimalnya peran dan kinerja pemerintah dalam memfasilitasi izin pendirian rumah ibadat di Indonesia.

6 Pendekatan aparat Kepolisian dan TNI memperkeruh konflik seputar pendirian rumah ibadat.

7 Masih terbatasnya sumber daya untuk mendukung fungsi FKUB.

ASPEK KONTEKS

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

1 Komposisi keanggotaan FKUB yang kurang tepat.

2 Perbedaan penafsiran terhadap PBM 2006 dan belum adanya sinergi yang cukup baik di antara Kemenag dan Kemendagri.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

3 FKUB dan Pemerintah Daerah sering berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4 FKUB belum maksimal menjalankan perannya.

5 Lemahnya perspektif toleransi kepala daerah yang diikuti tekanan organisasi masyarakat.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

6 **Masih terdapat tantangan dalam mekanisme penyelesaian masalah terkait izin pendirian rumah ibadat.**

7 **Kurangnya pemahaman masyarakat akan keragaman dan pemaknaan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.**